

Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Layli Lathifah Isnaini Putri, Siti Aisyah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: laylilathifah02@gmail.com, sa150@ums.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan guna menguji pengaruh faktor sosial ekonomi seperti IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan Per Kapita atas gaji minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada 2017 sampai dengan 2021. Data yang dipakai adalah data sekunder dengan data panel dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis regresi linier dipakai dengan software Eviews 10. Temuan studi menampilkan bahwa PDRB dan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif yang cukup besar atas upah minimum, sedangkan IHK dan TPAK mempunyai pengaruh yang kecil. Pemerintah sebaiknya menjaga tingkat pertumbuhan PDRB dan Pendapatan per Kapita tingkat upah yang baik bagi pekerja di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Upah Minimum, IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of socio-economic factors such as CPI, TPAK, GRDP, and per capita income on district/city minimum wages in Central Java Province from 2017 to 2021. The data used is secondary data with panel data from the Provincial Statistics Center Central Java. The linear regression analysis method was used with the Eviews 10 software. The study's results show that GRDP and per capita income have a big good effect on the minimum wage, while CPI and TPAK have a small effect. The government should maintain a good level of GDP growth and income per capita wage rates for workers in the Province of Central Java.

Keywords : Minimum Wage, CPI, TPAK, GDP, and Per Capita Income

PENDAHULUAN

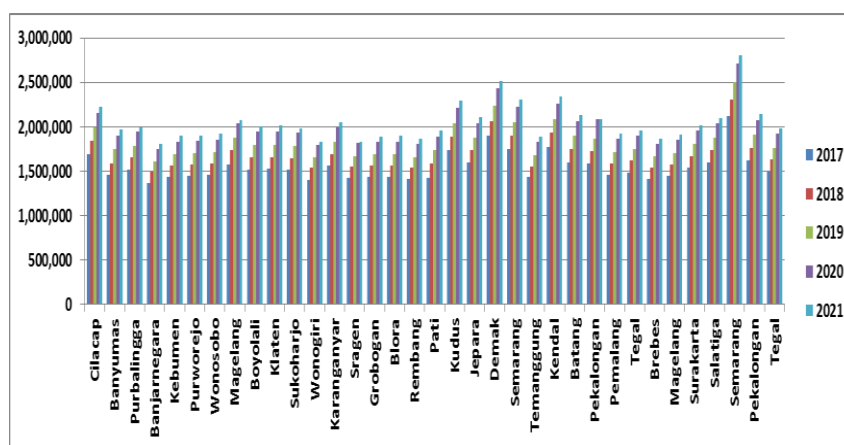
Pekerja ialah faktor fundamental produksi yang mencakup penyediaan jasa dan memainkan peran vital dalam memastikan kelancaran dan tidak terputusnya proses produksi. Sebab itu, karyawan berhak memperoleh kompensasi berwujud upah dari perusahaan. Salah satu indikator kehidupan buruh adalah upah. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh dunia usaha agar dapat memberikan upah pekerja yang sepadan dengan keluaran dan permintaan kerja (Charysa, 2013).

Persepsi yang berbeda tentang upah oleh pengusaha dan pekerja memiliki definisi yang berbeda dalam hal kepentingan. Gaji merupakan bagian penting dari biaya produksi bagi dunia usaha dan dianggap sebagai pengurang tingkat keuntungan yang dihasilkan, sehingga pengusaha bertujuan untuk menjaga gaji serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sementara itu, penghasilan yang tidak memenuhi kebutuhan penghidupan yang baik dapat menyebabkan pegawai tidak dapat bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, pekerja mengharapkan upah yang lebih tinggi untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Kertiasih, 2017).

Pengusaha dan pekerja memiliki pandangan yang berbeda tentang upah dan peran pemerintah diperlukan untuk mengatur upah. Mengingat bahwa pekerja pasar menempatkan pekerja pada posisi yang rentan, upaya yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengusaha dan pekerja. Tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan gaji adalah menetapkan kebijakan upah minimum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penurunan upah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan secara bertahap mempersempit ketegangan antara pekerja berupah tertinggi dan terendah (Damanik, 2021). Berdasarkan realitas regional dan kemampuan bisnis, iklim perekonomian saat ini memungkinkan struktur upah yang lebih realistis. Di banyak daerah di Indonesia, upah minimum

mendapati kelonjakan dari tahun ke tahun. Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi di Indonesia, setiap tahunnya selalu menaikkan upah minimum.

Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari 2017 hingga 2021 tergambar pada Grafik 1. Kabupaten Semarang mempunyai upah minimum tertinggi di Indonesia yaitu sebesar Rp 2.810.525 per tahun. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki upah minimum terendah sebesar Rp. 1.805.000. Aturan kenaikan rata-rata UMK tidak bisa digeneralisasikan karena bergantung pada beberapa parameter, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja, serta kecakapan dunia usaha di tiap daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan pemenuhan KHL. Teori ekonomi memaparkan, pendapatan dapat dijelaskan sebagai imbalan bagi pekerja untuk memberikan layanan mental kepada pemberi kerja, sehingga tidak ada perbedaan pendapatan antara pekerja tetap dan tidak tetap (Sukirno, 2005).



Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Gambar 1
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu komponen yang dapat dipakai guna menetapkan upah minimum. IHK dihitung dalam bentuk persentase setiap bulan dan tahun, sehingga dapat digunakan sebagai indikator naik atau turunnya harga-harga kebutuhan pokok, serta sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperluas pertumbuhan ekonomi (Charysa, 2013). Selain IHK, TPAK juga diperhitungkan dalam perhitungan upah minimum. TPAK bisa dipakai guna mengenali pasokan pekerja karena upah pada umumnya bergantung pada pasokan pekerja. Setelah pasokan pekerja diketahui, upah layak bagi pekerja dapat disesuaikan. Terbatasnya pasokan pekerja dapat menurunkan TPAK sehingga meningkatkan pasokan pekerja. Apabila suplai pekerja naik, maka kelebihan suplai pekerja tersebut akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya dibatasi oleh peraturan sehingga mengakibatkan penurunan tingkat upah (Armidi, 2018).

Faktor selanjutnya yang menentukan upah minimum merupakan PDRB. Menaikkan upah minimum jika produktivitas pekerja, yang diukur dengan output, meningkat. Meningkatnya produk PDRB menunjukkan berkembangnya perekonomian suatu daerah. Hal ini dikarenakan kuantitas output mempengaruhi keuntungan yang dihasilkan. Apabila keuntungan meningkat, upah minimum juga meningkat (Damanik, 2021). Faktor terakhir yang menentukan upah minimum yakni Pendapatan per Kapita. Pendapatan per kapita ialah ukuran tingkat kemakmuran serta pembangunan suatu daerah, sehingga berdampak terhadap upah minimum. Peningkatan pendapatan per kapita memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa yang disajikan produsen, sehingga meningkatkan nilai upah minimum dan meningkatkan keuntungan bagi pengusaha yang memungkinkan pengusaha membayar upah lebih tinggi kepada pekerjanya. Oleh karena itu, besar kecilnya upah minimum dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Nurtiyas, 2016).

Permasalahan upah minimum tiap daerah adalah disparitas jumlah uang yang dibutuhkan untuk hidup terhormat. Beberapa faktor, antara lain kepadatan ekonomi, kecepatan perputaran ekonomi, dan teknologi, berkontribusi terhadap hal ini. Selain itu, perkembangan ekonomi dan inflasi

berdampak pada tingkat upah minimum. Jika pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak terlalu besar, maka upah minimum pun demikian. Namun jika perkembangan ekonomi dan inflasi tinggi, maka upah minimum akan naik. Penelitian ini menggunakan model data panel guna mengetahui IHK, TPAK, PDRB, serta pendapatan per orang untuk upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2021.

METODE

Studi ini mengkaji aspek-aspek sosial ekonomi yang memengaruhi tingkat upah minimum tahun 2017 hingga 2021 dengan memakai model regresi data panel. Persamaan modelnya adalah sebagai berikut: $Wage = \beta_0 + \beta_1IHK_t + \beta_2TPAK_t + \beta_3PDRB_t + \beta_4ppk_t + \varepsilon_t$

Dimana *wage* merupakan tingkat upah minimum dengan satuan juta rupiah pada tahun 2017 – 2021, IHK mencerminkan nilai indeks harga konsumen dalam satuan persentase, TPAK ialah jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam ekonomi di suatu daerah dalam satuan persentase, PDRB adalah total nilai bruto sektor-sektor ekonomi di suatu daerah dalam satuan data persentase, dan PPK adalah pendapatan rata-rata yang didapat per orang di suatu daerah dalam jutaan rupiah. Data penelitian tersusun atas informasi *time series* dan *cross sectional*. Data *cross-sectional* mencakup 29 kabupaten dan 6 kota, sedangkan *data time series* mencakup periode pengamatan 2017-2021. Data yang dipakai berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Metode CEM, FEM, dan REM digunakan dalam langkah estimasi CEM, FEM, dan REM pada model regresi data panel. Uji Chow serta Uji Haussman dipakai guna memilih model estimasi terbaik, menguji rasionalitas model, serta menguji validitas pengaruh model estimasi yang dipilih.

HASIL

Tabel 1.
Hasil Estimasi Model Ekonometrika

Variable	CEM		FEM		REM	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	11.39388	0.0000	-10.96740	0.0000	10.41873	0.0000
IHK	1.12E-06	0.8912	-9.46E-08	0.9834	3.01E-07	0.9457
TPAK	0.00278	0.4316	0.004610	0.1937	0.002795	0.3529
LOG(PDRB)	0.088247	0.0000	1.47333	0.0000	0.125674	0.0000
LOG(PPKAP)	0.073149	0.0003	0.001315	0.9612	0.092843	0.0000
R ²	0.426043		0.918436		0.237908	
Adj. R ²	0.404586		0.875978		0.209419	
F-stat	19.85625		21.63162		8.350768	
Prob.(F-stat)	0.000000		0.000000		0.000007	

Sumber: data olahan

Tabel 2
Hasil Estimasi Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	12.961549	(34,73)	0.0000

Sumber: data olahan

Tabel 2 nilai *p-value* untuk $F \leq \alpha$ 0,05, maka *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk digunakan.

Tabel. 3
Hasil Estimasi Haussman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f	Prob.
Cross-section random	136.364794	4	0.0000

Sumber: data olahan

Tabel 3 nilai p -value untuk $F \leq \alpha$ 0,05, maka *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk digunakan.

Tabel 4
Model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Wage _{it} = 11.3939	+ 0.0000IHK _{it} (0.8912)	+ 0.0028TPAK _{it} (0.4316)	+ 0.0882PDRB _{it} (0.0000)	+ 0.0731PPK _{it} (0.0003)
R ² =0.4260; DW = 0.4648; F-stat = 19.8562; Prob(F-stat) = 0.0000				

Sumber: data olahan

Tabel 5
Efek *Fixed Effect Model* (FEM)

No	Wilayah	Effect	No	Wilayah	Effect
1	Kabupaten Cilacap	-1.925903	19	Kabupaten Kudus	-1.500999
2	Kabupaten Banyumas	-0.770783	20	Kabupaten Jepara	0.211690
3	Kabupaten Purbalingga	0.457072	21	Kabupaten Demak	0.599221
4	Kabupaten Banjarnegara	0.541874	22	Kabupaten Semarang	-0.485215
5	Kabupaten Kebumen	0.218210	23	Kabupaten Temanggung	0.563013
6	Kabupaten Purworejo	0.811217	24	Kabupaten Kendal	-0.221568
7	Kabupaten Wonosobo	0.742122	25	Kabupaten Batang	0.712586
8	Kabupaten Magelang	0.053030	26	Kabupaten Pekalongan	0.581527
9	Kabupaten Boyolali	0.060895	27	Kabupaten Pemalang	0.368600
10	Kabupaten Klaten	-0.221706	28	Kabupaten Tegal	-0.075327
11	Kabupaten Sukoharjo	-0.187249	29	Kabupaten Brebes	-0.536288
12	Kabupaten Wonogiri	0.097462	30	Kota Magelang	1.880381
13	Kabupaten Karanganyar	-0.142931	31	Kota Surakarta	-0.534804
14	Kabupaten Sragen	-0.241113	32	Kota Salatiga	1.373453
15	Kabupaten Grobogan	0.211005	33	Kota Semarang	-2.233058
16	Kabupaten Blora	0.300996	34	Kota Pekalongan	1.761112
17	Kabupaten Rembang	0.747805	35	Kota Tegal	1.150659
18	Kabupaten Pati	-0.417134			

Sumber: data olahan

Koefisien R^2 menampilkan kekuatan prediksi model estimasi. Pada Tabel 4 diketahui FEM mempunyai nilai R^2 sebesar 0,426043, artinya 42,60% dapat dijelaskan oleh IHK, PDRB, TPAK dan pendapatan per kapita. Sementara itu sisanya sebesar 57,40% dipaparkan oleh variabel lain di luar penelitian. Temuan uji signifikansi uji F menampilkan nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,0000 < 0,01$ (α), artinya IHK, PDRB, TPAK, dan pendapatan per kapita berpengaruh akan upah minimum.

Berdasarkan temuan penelitian ini, IHK tak berpengaruh atas upah minimum. Hal ini karena kenaikan perusahaan diperhitungkan sebagai kenaikan biaya produksi. Kemudian, untuk menutupi biaya produksi, perusahaan menempuh solusi dengan menaikkan harga output. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga barang di pasar. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Bersales & Lucagbo (2014) yang menyatakan bahwa CPI mempunyai dampak besar atas upah minimum. Berdasarkan penelusuran, TPAK tidak berdampak atas upah minimum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa upah akan disesuaikan dengan penawaran pasar pekerja. Penurunan permintaan pekerja akan menyebabkan peningkatan pasokan pekerja dan penurunan upah. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan temuan Armidi (2018) yang menyatakan bahwa TPAK tidak berdampak akan upah minimum.

Diketahui PDRB membuat upah minimum naik. Jika angka PDRB naik, maka laju pertumbuhan suatu daerah juga meningkat. Hal ini mendukung gagasan bahwa PDRB cocok untuk upah minimum. Ketika PDRB naik, upah minimum juga naik. Temuan penelitian ini dikuatkan dengan temuan Charysa (2013) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh atas upah minimum. Sebagaimana diketahui bahwa upah minimum dipengaruhi oleh pendapatan per orang. Jika rata-rata pendapatan per orang naik, maka upah minimum juga meningkat. Sebab, kenaikan upah minimum berdampak pada kesejahteraan dan kesejahteraan penduduk setempat. Apabila taraf hidup suatu daerah membaik maka nilai upah minimum juga akan meningkat. Sebagai indikator tahunan taraf hidup suatu daerah, pendapatan per kapita berfungsi sebagai pedoman kebijakan pemerintah. Temuan

penelitian ini diperkuat dengan penelitian Hasbi (2019) yang menunjukkan bahwa upah minimum sangat dipengaruhi oleh pendapatan per orang.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Pendapatan per Kapita berpengaruh positif besar terhadap gaji minimum, sedangkan variabel CPI serta TPAK tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Armidi, Erfit, Y. 2018, Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi, *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(1), 2303–1220.
- Bersales, L. G. S. & Lucagbo, M. D. C. 2014, Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines, *The Philippine Statistician*, 63(2) 71–85.
- Charysa, N. N. 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011, *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 277–285.
- Hasbi, A. R., Dahri, A. & Salju, S. 2019, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Luwu Timur, *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1).
- Kertiasih, L. 2017, Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015 Universitas Pendidikan Ganesha, 9(1), 148–157.
- Nurtiyas, F. 2016, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukirno, S. 2005, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.